

OPERASI-OPERASI MILITER DI PAPUA: PAGAR MAKAN TANAMAN?

Amiruddin al Rahab*

Abstract

The aim of this paper is to describe military operations in Papua undertaken by Kodam Tjendrawasih. The operations conducted by the Kodam based on security approach have caused thousands of civilian victims. Therefore, Kodam that suppose to be the protector of the people and the state has triggered bigger problem for unity of the nations, separating movement in the region. The problem of Papua has to be solved by targeting the roots of the problem, which is the role of military as a tool for solving conflict in Papua. After all, the main problem in Papua has to be identified and solved by an approach that reaches the basic problem in that region: self esteem and the welfare of the people of Papua.

1. Pengantar

Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua¹ sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi ranah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).²

Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua adalah

menghancurkan apa yang mereka sebut gerombolan bersenjata OPM.³ Obsesi penghancuran OPM itu juga dimotivasi oleh kepetingan ekonomi dan politik. Secara politik petinggi AD, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim adalah juga Ketua Pembina Golkar di wilayahnya.⁴ Secara ekonomi, semua perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai objek vital nasional. Artinya perusahaan-perusahaan itu berada di bawah naungan militer untuk keamanannya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus menyetor sejumlah uang.

Pada gilirannya dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis. Untuk motivasi ini, OPM yang selalu kecil

* Peneliti di ELSAM, Jakarta dan Inisiator Pokja Papua yang mendalami masalah hak asasi manusia dan militer serta politik lokal, spesialisasi masalah separatisme dan gerakan perlawanan di Papua.

¹ Dalam tulisan ini, Papua dipakai untuk mengacu kepada masa kini. Sementara untuk mengacu ke masa lalu di pakai Irian Barat atau Irian Jaya. Namun istilah itu dipakai secara bergantian dalam tulisan ini. Di samping itu untuk menunjukkan orang selalu dipakai istilah Papua.

² Pemakaian istilah ABRI atau TNI sangat terkait konteks waktunya. Dalam tulisan ini istilah itu dipakai saling bergantian. Bahkan juga dipakai istilah insitusi militer atau insitusi keamanan.

³ Obsesi pimpinan militer untuk menghancurkan gerombolan bersenjata di Papua dapat dilihat dalam Mayjen Samsudin, *Pergolakan di Perbatasan: Operasi Pembebasan Sandera Tanpa Pertumpahan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm 59—60.

⁴ Hal ini berlangsung sampai Pemilu 1997. Obsesi politik itu adalah mengupayakan Golkar harus menang dalam setiap Pemilu di Papua. Bahkan Pangdam juga merupakan anggota MPR dari fraksi utusan daerah.

kekuatannya selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi NKRI. Obsesi itu tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah “bom waktu yang ditinggalkan Belanda” atau buah dari hasutan kelompok separatis, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Maka dari itu untuk mengenyahkan “hantu OPM” itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh)⁵ dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun.

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat bahwa pengalaman di bawah cengkraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Papua. Benny menuliskan bahwa dalam seluruh pengalaman pahit itu, orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek, yaitu objek operasi militer.⁶

Sejarah sebagai objek kekerasan itu-lah yang selalu diingkari oleh Indonesia sampai hari ini. Pihak-pihak militer atau aparat keamanan di Papua sama sekali tidak pernah merasa melakukan kejahatan terhadap siapa pun di Papua, karena operasi-operasi militer yang mereka lancarkan, atau penangkapan-penangkapan serta penyiksaan

atau pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua hanyalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelindung NKRI dari rongrongan organisasi yang disebut sebagai OPM.

Tulisan ini berusaha membeberkan operasi-operasi militer yang digelar oleh Kodam yang berpataka “*Praja Ghupta Vira*” (Ksatria Pelindung Masyarakat) di Papua. Dalam pandangan orang-orang Papua, ABRI alih-alih menjadi pelindung, malah menjadi seperti pagar makan tanaman. Operasi-operasi militer mendatangkan kesengsaraan lahir dan batin bagi orang-orang Papua. Pandangan orang Papua itu masih bertahan sampai saat ini sehingga mendorong mereka menuntut merdeka karena rendahnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang ada di Papua.

Dalam keperluan tulisan ini, operasi-operasi militer yang berjalan terus-menerus dilihat sebagai kemenangan politik ABRI dalam melakukan *bargaining* dengan aktor-aktor negara lain dalam mengambil kebijakan. Dwifungsi ABRI membuat aktor-aktor politik lainnya kehilangan kendali terhadap ABRI. Hal itu terjadi karena kuatnya pengaruh perwira militer dalam politik lokal Papua baik dalam badan legislatif Papua maupun dalam lembaga eksekutif di Papua.⁷

2. ABRI: Wajah Indonesia di Papua

Sampai saat ini, argumen Indonesia bahwa proses penggabungan Papua ke dalam Indonesia adalah suatu “kehendak dan panggilan sejarah” dari sikap patriotisme para sukarelawan terasa tidak memadai lagi.

⁵ Membunuh di Papua sungguh dalam artian harfiah. Pembunuhan terhadap Arnold Ap tahun 1984 atau pembunuhan terhadap Theis H. Eluay tahun 2002 adalah contoh dari kebijakan itu. Bahkan Kasad Jenderal Ryamizar Ryakudu menyatakan para anggota Kopassus yang telah divonis oleh Pengadilan Tinggi Militer Surabaya terbukti membunuh Theis sebagai Pahlawan NKRI.

⁶ Benny Giyai, *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*, Elsham-Dieyai, 2000. Dalam pandangan Benny, hari merdeka itu adalah hari datangnya kebahagiaan sehingga penderitaan tidak lagi menjadi hari-hari orang Papua. Selain itu, Benny juga meyakini bahwa hari itu akan datang sebagaimana kosmologi orang Papua yang meyakini bahwa waktu berputar antara susah menuju senang dalam babakan-babakan tertentu. Hlm. 8—9.

⁷ Konsepsi dwifungsi ABRI membuat cara pandang aktor-aktor politik lainnya terkesampingkan. Selain itu, selama operasi militer itu berlangsung, jajaran birokrasi dikendalikan pula oleh para perwira aktif, mulai dari Ketua DPRD I dan II se-Papua, wakil gubernur, bupati dan atau wakil bupati se-Papua. Institusi strategis juga dikendalikan oleh perwira ABRI aktif, yaitu Kantor Direktorat Sospol Provinsi dan Kabupaten se-Papua dan Mawil Hansip Provinsi dan Mawil Hansip Kabupaten se-Papua.

kekuatannya selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi NKRI. Obsesi itu tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah “bom waktu yang ditinggalkan Belanda” atau buah dari hasutan kelompok separatis, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Maka dari itu untuk mengenyahkan “hantu OPM” itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh)⁵ dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun.

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat bahwa pengalaman di bawah cengkraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Papua. Benny menuliskan bahwa dalam seluruh pengalaman pahit itu, orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek, yaitu objek operasi militer.⁶

Sejarah sebagai objek kekerasan itu-lah yang selalu diingkari oleh Indonesia sampai hari ini. Pihak-pihak militer atau aparat keamanan di Papua sama sekali tidak pernah merasa melakukan kejahatan terhadap siapa pun di Papua, karena operasi-operasi militer yang mereka lancarkan, atau penangkapan-penangkapan serta penyiksaan

atau pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua hanyalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelindung NKRI dari rongrongan organisasi yang disebut sebagai OPM.

Tulisan ini berusaha membeberkan operasi-operasi militer yang digelar oleh Kodam yang berpataka “*Praja Ghupta Vira*” (Ksatria Pelindung Masyarakat) di Papua. Dalam pandangan orang-orang Papua, ABRI alih-alih menjadi pelindung, malah menjadi seperti pagar makan tanaman. Operasi-operasi militer mendatangkan kesengsaraan lahir dan batin bagi orang-orang Papua. Pandangan orang Papua itu masih bertahan sampai saat ini sehingga mendorong mereka menuntut merdeka karena rendahnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang ada di Papua.

Dalam keperluan tulisan ini, operasi-operasi militer yang berjalan terus-menerus dilihat sebagai kemenangan politik ABRI dalam melakukan *bargaining* dengan aktor-aktor negara lain dalam mengambil kebijakan. Dwifungsi ABRI membuat aktor-aktor politik lainnya kehilangan kendali terhadap ABRI. Hal itu terjadi karena kuatnya pengaruh perwira militer dalam politik lokal Papua baik dalam badan legislatif Papua maupun dalam lembaga eksekutif di Papua.⁷

2. ABRI: Wajah Indonesia di Papua

Sampai saat ini, argumen Indonesia bahwa proses penggabungan Papua ke dalam Indonesia adalah suatu “kehendak dan panggilan sejarah” dari sikap patriotisme para sukarelawan terasa tidak memadai lagi.

⁵ Membunuh di Papua sungguh dalam artian harfiah. Pembunuhan terhadap Arnold Ap tahun 1984 atau pembunuhan terhadap Theis H. Eluay tahun 2002 adalah contoh dari kebijakan itu. Bahkan Kasad Jenderal Ryamizar Ryakudu menyatakan para anggota Kopassus yang telah divonis oleh Pengadilan Tinggi Militer Surabaya terbukti membunuh Theis sebagai Pahlawan NKRI.

⁶ Benny Giyai, *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*, Elsham-Dieyai, 2000. Dalam pandangan Benny, hari merdeka itu adalah hari datangnya kebahagiaan sehingga penderitaan tidak lagi menjadi hari-hari orang Papua. Selain itu, Benny juga meyakini bahwa hari itu akan datang sebagaimana kosmologi orang Papua yang meyakini bahwa waktu berputar antara susah menuju senang dalam babakan-babakan tertentu. Hlm. 8—9.

⁷ Konsepsi dwifungsi ABRI membuat cara pandang aktor-aktor politik lainnya terkesampingkan. Selain itu, selama operasi militer itu berlangsung, jajaran birokrasi dikendalikan pula oleh para perwira aktif, mulai dari Ketua DPRD I dan II se-Papua, wakil gubernur, bupati dan atau wakil bupati se-Papua. Institusi strategis juga dikendalikan oleh perwira ABRI aktif, yaitu Kantor Direktorat Sospol Provinsi dan Kabupaten se-Papua dan Mawil Hansip Provinsi dan Mawil Hansip Kabupaten se-Papua.

Apalagi argumentasi yang menyatakan bahwa Papua telah menjadi bagian dari Indonesia sejak alam terbentang karena terdapatnya persamaan adanya kapak batu persegi dan adanya persamaan relief lukisan di dinding gua batu.

Lebih tak berarti lagi, apabila klaim Indonesia itu semata disandarkan pada penguasaan Papua oleh kerajaan kuno seperti Sriwijaya, Majapahit sampai Sultan Tidore.⁸ Klaim atas Papua yang disandarkan pada argumen bahwa Papua adalah wilayah jajahan Belanda —sejak tahun 1828 berkat keberhasilan Belanda mendirikan benteng *Fort du Buis* di Teluk Triton, Kaimana— secara otomatis menjadi wilayah Indonesia, juga tidak membantu banyak dalam menyakinkan orang Papua bahwa mereka adalah bagian sah dari Republik Indonesia.⁹

Semua argumen itu terasa hambar karena tidak berasal dari pengalaman nyata orang-orang Papua sendiri dalam berintegrasi dengan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Lebih tepatnya, orang Papua berinteraksi secara nyata dengan entitas negara Indonesia adalah melalui sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1962 di New York dan dilanjutkan dengan referendum tujuh tahun kemudian. Referendum itu disebut oleh Indonesia sebagai Pepera yang dijalankan secara musyawarah antara 1.025 orang mewakili seluruh orang Papua yang ada kala itu. Baru setelah Pepera di tahun 1969 itulah Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintahan militer.

Operasi militer untuk memaksa Papua berintegrasi ke dalam Indonesia secara faktual dirintis mulai tahun 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua

dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian daerah itu dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua.¹⁰ Sejak tahun 1961 itulah, masyarakat Papua mengenal Indonesia secara nyata berkat adanya pasukan-pasukan ABRI yang menyusup ke Papua. Artinya, wajah pertama Indonesia di Papua diwakili oleh sepak terjang para pasukan infiltran ini.

Fase infiltrasi ini ditujukan untuk membentuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya penyerbuan Papua oleh Indonesia. Dalam fase ini, dimasukkan lebih kurang 10 kompi prajurit ABRI ke Papua. Fase kedua adalah melakukan serangan terbuka di beberapa daerah seperti Biak, Fak-fak, Sorong, Kaimana, dan Merauke. Fase ketiga adalah konsolidasi pasukan sebagai kekuatan militer Indonesia di Papua.¹¹

Salah satu perwira ABRI yang menjadi infiltran ini adalah Kapten Benny Moerdani (kemudian menjadi Menghankam/Pangab 1983—1988, Menhankam 1988—1993) dengan pasukan berkekuatan 206 yang berasal dari RPKAD dan Kompi II Batalyon 530/Para dari Kodam Brawijaya. Pasukan ini diterjunkan di Merauke dengan sandi Operasi Naga. Operasi penyusupan di Papua ini secara keseluruhan diberi sandi Operasi Djayawijaya. Setelah *New York Agreement* disetujui, Benny dipindahkan ke Hollandia (Jayapura) menjadi komandan sementara seluruh pasukan infiltran Indonesia di Irian Barat.¹²

Seluruh pasukan infiltran ini sebagaimana disyaratkan oleh *New York Agreement* kemudian diorganisasi ke dalam Kontingen Indonesia (Kotindo) sebagai pasukan keamanan UNTEA. Konsentrasi dari pasukan Indonesia ini awalnya adalah Merauke, Kaimana, Fak-fak,

⁸ Sejarah yang menguntai jauh ke belakang sebagai legitimasi Indonesia atas Papua seperti ini dapat dibaca dalam *Irian Barat dari Masa ke Masa, Sejarah Militer Kodam XVII/Tjendrawasih*, Puserjarah ABRI, 1971. Hlm. 9—16.

⁹ Argumentasi Papua adalah wilayah Indonesia karena bagian dari jajahan Belanda dipakai oleh Deplu Indonesia, lihat brosur *Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia*, Deplu RI, 1998.

¹⁰ Drs. M. Cholil, *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, Puserjarah ABRI - Dephankam*, 1971.

¹¹ Julius Pour, Benny Mordani, *op cit*, hlm. 198.

¹² *Ibid*, hlm. 224—226.

dan Sorong. Semua pasukan Indonesia ini kemudian dibagi ke dalam empat datasemen, yaitu Datasemen A di Merauke, Datasemen B di Kaimana, Datasemen C di Fak-fak, dan Datasemen D di Sorong.

Pasukan-pasukan Indonesia ini kemudian diperbantukan kepada *United Nation Security Force* (UNSF) yang merupakan aparat keamanan UNTEA. Meskipun demikian, seluruh komando tetap berada di bawah Panglima Mandala. Artinya, pasukan Kotindo secara organik tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ABRI. Maka dari itu, segala tanggung jawab organisatoris dan administratif tetap menjadi tanggung jawab Indonesia.

Dengan posisi yang demikian, ABRI di Papua memiliki dua misi, formal merupakan alat kelengkapan dari UNTEA dalam UNSF, sementara informal adalah untuk melanjutkan komando Trikora. Maka dari itu, ABRI dalam Kotindo, lebih mementingkan tugas informalnya, yaitu mengawasi UNTEA agar tidak merugikan Indonesia dan menekan kekuatan-kekuatan sosial politik orang-orang Papua yang menentang Indonesia.

Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua di kemudian melahirkan satu sikap yang khas Papua pula, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi representasi Indonesia bertahun-tahun di Papua.¹³ Makna yang terbangun di balik itu adalah menolak menjadi Indonesia berarti menolak menjadi korban kekerasan dari ABRI. Sikap ABRI atas reaksi orang-orang Papua bukannya mencari jalan penyelesaian secara damai, melainkan mengintensifkan kekerasan dengan skala yang

lebih besar melalui operasi militer dengan menjadikan Papua sebagai DOM. Akibatnya, kekerasan menjadi lingkaran yang tiada putus di Papua selama puluhan tahun.¹⁴

Sejak itu secara perlahan, orang-orang Papua, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.¹⁵ Akibatnya, perlawanan terhadap Indonesia yang mulai buncah sejak tahun 1963 sampai hari ini tidak pernah berhenti. Selalu ada pemimpin baru dengan pengikut yang juga potensial terus tumbuh.¹⁶

3. Kodam: Tulang Punggung *Security Approach*

Tahun 1963, Men/Pangad Jend A. Yani mengeluarkan perintah Operasi Wisnumurti untuk mendatangkan pasukan dari divisi-divisi di Jawa, Makassar, dan Maluku untuk mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam XVII. Tugas pokok Kodam ini adalah menegakkan kewibawaan Pemerintah Indonesia, menjamin keamanan dan ketertiban serta membantu pemerintah sipil dalam membangun Irian Barat.¹⁷ Para infiltran yang tergabung dalam Kotindo adalah inti kekuatan ABRI di Papua ketika Kodam XVII/Tjendrawasih dibentuk.

¹⁴ Muridhan S. Widjojo, "Separatisme - Hak Asasi Manusia- Separatisme: Siklus Kekerasan di Papua, Indonesia" dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas*, Vol.III/No.1 Tahun 2005.

¹⁵ Mengenai wajah Indonesia itu adalah seluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit ABRI ini dapat ditelusuri dalam Decki Natalis Pigai BIK, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

¹⁶ Mengenai terus tumbuhnya perlawanan dan munculnya pemimpin-pemimpin baru dari setiap fase perlawanan itu lihat Yorris TH Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, PDP, Jayapura, 2002. Yorris tercatat sebagai anggota PDP yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa regenerasi perlawanan terus berlanjut selama kekerasan terus terjadi.

¹⁷ Irian Barat:.... *Op cit*, hlm.104.

¹³ Amiruddin, "Gerakan Papua Merdeka:Penciptaan Identitas Ke-Papuan versus Ke-Indonesia-an" dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas*, Vol.III/No.1 Tahun 2005

Sesungguhnya Kodam XVII yang awalnya bernama Kodam XVII/Irian Barat dibentuk melalui Surat Men/Pangad/No. Kpts-1058/8/1962 pada tanggal 17 Agustus 1962¹⁸ atau 2 hari setelah *New York Agreement* ditandatangani. Karena masa itu, Indonesia belum memiliki kewenangan pemerintahan di Papua. Kodam ini hanya berada secara bayangan dengan fungsi mengawasi UNTEA dan gerak-gerik politik orang-orang Papua, terutama yang pro-kemerdekaan Papua. Brigjen U. Rukmana yang komandan Kotindo merangkap sebagai Pangdam pertama di Papua.¹⁹

Kodam ini kemudian direalisasikan secara nyata baru 12 Januari 1963 mendekati hari penyerahan administrasi ke pemerintahan Papua dari UNTEA ke Indonesia. Kodam ini kemudian membentuk komando teritorialnya yang terdiri dari 3 Korem dan 23 Kodim. Kemudian komando teritorial ini diubah pada tanggal 3 Maret 1963 menjadi 3 Korem²⁰ dan 8 Kodim, 70 Puterpa dan 20 Kooterpa.²¹ Komando-komando ini berfungsi sebagai gelar pasukan dan sekaligus penguasaan teritorial dalam rangka fungsi sosial politik secara nyata.²² Di samping itu, juga ditambah dengan dua batalion infantri. Kodam mulai berfungsi secara riil 17 Mei 1963, setelah UNTEA mengalihkan tanggung jawab administrasi pemerintahan ke Indonesia.

¹⁸ Namun ulang tahun Kodam selalu diperingati tgl 17 Mei 1963. Hal ini mulai terjadi sejak tahun 1967.

¹⁹ *Irian Barat dari Masa ke Masa, op cit.*, hlm. 100-101.

²⁰ Sejak tanggal 5 Agustus 1964, jumlah Korem di Irian Barat dikurangi menjadi 2, yaitu Korem 171 dengan markas di Manokwari dan Korem 172 dengan markas di Merauke. Dua Korem ini bertahan sampai sekarang.

²¹ Dari 8 Kodim ini dua Kodim langsung di bawah Kodam, yaitu Kodim 1701 Jayapura dan Kodim 1702 Wamena. Sementara 4 Kodim berada di bawah Korem 171, yaitu Kodim 1711 Manokwari, Kodim 1712 Sorong, Kodim 1713 Seruai dan Kodim 1714 Fak-fak. Dua Kodim lainnya berada di bawah Korem 172, yaitu Kodim 1721 Merauke dan Kodim 1722 Tanah Merah. PUTERPA (Perwira Urusan Perlawanan Rakyat) sekarang setingkat dengan Koramil. Kooterpa (Koordinator Perlawanan Rakyat), sekarang Babinsa.

²² Pusat Sejarah Kodam XVII, *op cit.*

Kodam XVII/Irian Barat pada tanggal 30 Juni 1964 berganti nama menjadi Kodam XVII/Tjendrawasih dengan pataka-nya *Praja Ghupta Vira* yang berarti Ksatria Pelindung Masyarakat. Sejak tahun 1964, inti kekuatan Kodam XVII/Tjendrawasih terus berkembang dengan dibentuknya batalion-batalion baru, yaitu Batalion 751/Tjendrawasih di Manokwari yang berasal dari Kodam VII/Diponegoro, Yonif 752/Tjendrawasih di Sorong berasal dari Kodam VI/Siliwangi, dan Yonif 753/Tjendrawasih di Jayapura. Ketiga yonif ini merupakan pembaharuan dari yonif sebelumnya, yaitu Yonif 641/Tjendrawasih I yang berasal dari Diponegoro dan Yonif 642/Tjendrawasih II yang berasal dari Siliwangi. Ke dalam kedua batalion ini telah bergabung unsur dari Papua, yaitu para gerilyawan Kasuari/Trikora dan anggota eks-PVK (*Papuan Vrywillingers Korp*) setelah mereka dididik di Siliwangi dan di Diponegoro.²³ Jumlah seluruh pasukan ABRI pada awal kehadiran Kodam ini sekitar 2.000 prajurit lebih.

Peran militer—terutama AD—menjadi kian dominan di Papua ketika terjadi reorganisasi militer Indonesia setelah kekuasaan beralih dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Dominasi militer di Papua itu sejalan dengan menguatnya militer dalam kekuasaan di Indonesia. Menhankam/Pangab Benny Moerdani yang juga anggota MPR dalam sidang MPR tahun 1988 pernah menyatakan kekuatan militer dalam politik itu tak ubahnya sebagai partai politik. Di era Benny Moerdani menjadi Menhankam/Pangab inilah peranan Kodam menjadi komando yang dominan di daerah dan sekaligus satu-satunya kekuatan militer yang mengendalikan kondisi keamanan dan ketertiban sekaligus kondisi sosial-politik daerah.²⁴ Dalam menjalankan fungsi sosial-politik ini, ABRI aktif dalam menggalang

²³ *Irian Barat dari Masa ke Masa*, hlm 115.

²⁴ Lihat Julius Pour, *Benny Mordani: Profil Prajurit Negerawan*, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993, hlm. 469—474 dan hlm. 543—543.

kekuatan politik bersama dengan Golkar.²⁵ Sejak orang Papua ikut Pemilu Indonesia di tahun 1971 sampai Pemilu tahun 1997, Golkar tetap merupakan partai politik dominan di Papua dengan perolehan suara di atas 80%.

Sejalan dengan kebijakan itu, kemudian Kodam XVII/Tjendarawasih digabung dengan Kodam XV/Patimura menjadi Kodam XVII/Trikora²⁶ yang menjadi kekuatan hankam dan sosial politik utama pula di Papua. Sebagai kekuatan hankam dan sosial-politik titik berat tugas ABRI di Papua adalah mengatasi gangguan kamtibmas dan menangkal subversi dalam negeri. Dengan titik berat tugas militer seperti itu, Kodam akhirnya menjadi institusi yang dikuasai oleh AD.²⁷

Seiring dengan itu, rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi. Pengalaman buruk di bawah DOM ini, kemudian membangkitkan pengalaman buruk rakyat Papua selama proses awal integrasi dan Pepera. Pengalaman buruk itu kemudian tampil ke permukaan secara terbuka di kala kekuasaan militer dalam pemerintahan surut ketika reformasi politik terjadi tahun 1998. Di era reformasi, di Papua tumbuh keberanian mempersoalkan seluruh kekuasaan Indonesia di Papua yang didominasi oleh militer itu. Keberanian itu kian buncah ketika Panglima ABRI Jenderal Wiranto di bulan Agustus 1998 menyatakan minta maaf dan mencabut status Papua sebagai daerah DOM.²⁸

Dengan latar sejarah dan posisi politik seperti itu, militer di Papua merasa dan melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang menjaga keutuhan Indonesia di Papua. Pada

gilirannya, militer di Papua selalu bertindak keras terhadap segala bentuk gerakan atau opini yang mempertanyakan atau memprotes keadaan yang dirasakan kurang adil oleh tokoh-tokoh Papua. Pada gilirannya, militer Indonesia di Papua sangat mudah memvonis seluruh bentuk protes orang Papua sebagai gerakan separatis.

Ketika cap separatis sudah dialamatkan oleh militer kepada seseorang di Papua maka orang itu akan bisa menjadi korban dalam sekejap. Baik menjadi korban penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Aksi kekerasan itu berlangsung bertahun-tahun, dengan ribuan korban jiwa. Para korban dan keluarganya inilah bersama-sama dengan kalangan muda dan mahasiswa serta tokoh-tokoh terpelajar Papua di era reformasi mulai menyuarakan perlunya Indonesia mempertanggungjawabkan seluruh kekerasan itu. Untuk meminta pertanggungjawaban itu, wacana hak asasi manusia menjadi wacana yang paling dominan di Papua.

Kian menghujamnya cengkraman militer terhadap kehidupan sosial politik di Papua juga tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini yang begitu besar. Hal itu terlihat ketika PT Freeport mulai menanamkan investasinya di Papua. Untuk melindungi PT Freeport, militer di Papua mulai mengembangkan pengaruhnya dalam politik lokal dengan cara yang lebih keras.²⁹ Selain itu, militer juga memperbesar kekuasaannya dengan menempatkan diri sebagai pelindung dari mengalirnya ribuan para imigran dan transmigran dari luar Papua. Semuanya ini disebut oleh para petinggi militer sebagai tugas nasional dalam rangka menjaga integritas teritorial Indonesia di Papua.

Seluruh sepak terjang militer yang mendatangkan luka di hati orang Papua inilah

²⁵ Sejak orang Papua ikut Pemilu Indonesia di tahun 1971 sampai pemilu tahun 1999, Golkar selalu menang telak di atas 80% di Papua.

²⁶ Penggabungan terjadi bulan April 1985 berdasarkan surat perintah operasi KASAD No.1/September 1984.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 472.

²⁸ Kapan awal Papua bertatus DOM sampai saat ini belum ada informasi yang pasti. Namun dengan diumumkan pencabutan status DOM oleh Jenderal Wiranto 8 Agustus 1998 menandakan bahwa Papua pernah berstatus DOM. Setelah status DOM dicabut, Pangdam Papua menyatakan Papua berstatus daerah rawan.

²⁹ Mengenai perlindungan militer terhadap PT Freeport lihat, Amiruddin dan Aderito Soarea, *Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer*, ELSAM, Jakarta, 2003. Lihat juga, Denise Leith, *The Politics of Power: Freeport in Seharto's Indonesia*, University of Hawaii Press, Honolulu, 2003.

yang hendak diperbaiki dengan diberikan status otonomi khusus terhadap Papua. Pada bagian Menimbang dari UU Otsus menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memenuhi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, khususnya hak asasi masyarakat Papua.

4. Operasi-Operasi Militer: Penderitaan Rakyat Papua

Untuk mendapatkan perhatian, OPM kerap melancarkan gerakan bersenjata secara sporadis. Hal itu ditempuh OPM karena terbatasnya kemampuan tempur akibat sedikitnya jumlah persenjataan. Selain itu, juga karena tidak mudahnya medan Papua untuk membangun kekuatan besar yang terorganisasi secara baik.³⁰ Selain gerakan bersenjata, secara umum usaha OPM untuk menunjukkan diri mereka tetap eksis adalah aksi penculikan, aksi penyeragaman, pengibaran bendera Bintang Kejora, penyebaran propaganda melalui media selebaran, dan mobilisasi demonstrasi atau rapat umum di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kerap pula ditempuh aksi lintas batas, terutama ke PNG.

OPM pada awalnya adalah reaksi orang-orang Papua atas sikap pejabat-pejabat asal Indonesia yang mengecewakan mereka sejak tahun 1963.³¹ Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Kebar, Manokwari 26 Juli 1965. Perlawanan di Kebar ini dipimpin oleh Johannes Djambuani dengan kekuatan 400 orang yang berasal dari suku Karun dan Ayamaru. Seiring dengan itu, suku Arfak di Arfai,

Manokwari melancarkan pula perlawanan yang dipimpin oleh Mayor Tituler Lodewijk Mandatjan yang diikuti oleh Kapten Tituler Barent Mandatjan dan Lettu Tituler Irogi Maedogda dengan mengajak penduduk lari ke hutan.

Sementara di Manokwari 28 Juli 1965 juga terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Permanas Ferry Awom dengan pengikutnya sekitar 400 orang yang berasal dari suku Biak, Ajamaru, Serui dan Numfor menyerang asrama Yonif 641/Tjendrawasih I. Dalam penyerangan ini 3 anggota ABRI tewas.³²

Setelah terjadi penyerangan, ABRI melancarkan Operasi Sadar di bawah komando Pangdam Brigjen R. Kartidjo untuk menghancurkan kelompok perlawanan. Operasi Sadar ini tidak saja bertujuan untuk mematahkan perlawanan yang terjadi di Manokwari, tetapi juga menegaskan kekuasaan Kodam XVII atas seluruh wilayah Papua. Tugas pokok operasi adalah melakukan penghancuran terhadap gerombolan yang bergerak di sekitar Manokwari dan Kebar sekaligus, minimum menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma, baik mati maupun hidup sebelum tanggal 17 Agustus 1965. Operasi ini sejak 10 Agustus dilancarkan secara intensif dan terus-menerus ke kampung-kampung yang menjadi basis-basis perlawanan. Dalam operasi pengejaran terhadap kelompok perlawanan, 36

Center, Washington, 2004. Hlm. 22—23. Sikap pejabat Indonesia yang mengecewakan itu dideskripsikan pula oleh Djopari. Misalnya, membakar buku dan dokumen yang berbahasa Belanda, mengintimidasi dan menodong tokoh-tokoh Papua yang memiliki bacaan dalam bahasa Belanda sebagai pro-Belanda, mengambil rumah-rumah penduduk dengan menyatakan rumah itu milik Belanda, serta mengambil berbagai barang dalam rumah penduduk atau pejabat lokal kemudian dibawa keluar Papua. Djopari, hlm. 82—84.

³⁰ Seluruh uraian mengenai OPM ini disandarkan pada John RG Djoparai, *Pemberontakan Organisasi Papua Medeka*, Grasindo, Jakarta, 1993 dan Robin Osborn, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, (terj.), Elsam, Jakarta, 2001.

³¹ Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*, East-West

³² Seluruh uraian mengenai OPM ini disandarkan pada John RG Djoparai, *Pemberontakan Organisasi Papua Medeka*, Grasindo, Jakarta, 1993 dan Robin Osborn, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, (terj.), Elsam, Jakarta, 2001.

orang penduduk yang disebut sebagai anggota OPM tewas.³³

Sejalan dengan operasi pengejaran ini, Operasi Sadar dikembangkan ke seluruh wilayah Irian Barat pada tanggal 25 Agustus 1965. Sejak ini, Operasi Sadar langsung dipimpin oleh Pangdam. Berdasarkan perintah operasi ini, wilayah Papua kemudian dibagi ke dalam 4 sektor. Sektor I adalah daerah yang meliputi Manokwari dan sekitarnya menjadi pos terdepan operasi. Untuk daerah ini dilancarkan operasi intelijen dan teritorial untuk mendukung operasi fisik (tempur). Di sektor lainnya yang belum menunjukan adanya perlawanan fisik, hanya dilancarkan operasi intelijen dan teritorial dengan tujuan untuk mencegah meluasnya pengikut perlawanan.³⁴

Operasi ini dilanjutkan oleh Pangdam yang baru, yaitu Brigjen R. Bintoro. Sepanjang tahun 1966—1967 operasi tempur ABRI kian massif untuk menghadapi kelompok-kelompok perlawanan yang tumbuh dari suku Arfak di Manokwari di bawah pimpinan Lodewijk Mandatjan dan Ferry Awom dan juga di daerah sekitar Jayapura dan Merauke. Nama operasi kali ini adalah Operasi Baratayudha dengan mendatangkan pasukan dari Yonif 314/Siliwangi dengan 2 kompi Yon 700/RIT dan 2 kompi Yon 935/Brimob. Selain itu dalam operasi ini juga dilibatkan 2 Ton KKO/ALRI, 1 Ton Kopasgat dan 1 tim RPKAD. Pasukan tempur ini juga diperkuat dengan 2 pesawat Bomber B-26 dan 1 Pesawat Dakota dan 1 Kapal Perang.³⁵

Operasi Baratayudha bertujuan menghancurkan perlawanan dan mempersiapkan kemenangan Pepera. Operasi ini bersifat tempur dengan dibantu oleh operasi intelijen dan teritorial yang disiapkan dalam tiga fase, yang fase terakhirnya adalah tahun 1968.

Fase ketiga ini ditujukan untuk konsolidasi persiapan memenangkan Pepera.

Operasi Baratayudha yang banyak menelan korban jiwa membuat kelompok perlawanan terpecah menjadi kecil-kecil dan surut. Untuk mengintensifkan kemenangan dalam Pepera, kelompok-kelompok kecil ini kemudian dikejar terus-menerus. Inti dari pasukan yang mengejar ini adalah dari RPKAD. Sejalan dengan ini, *show of force* dari kekuatan yang diiringi dengan operasi intelijen dan teritorial dilancarkan di daerah yang perlawanan kecil dan melemah untuk memenangkan situasi psikologis.³⁶ Sepanjang tahun 1967, operasi berhasil menembak mati 73 orang dan menangkap 60 orang dengan menyita 39 pucuk senjata. Adapun yang menyerahkan diri 3.539 orang. Operasi Baratayudha ini menggetarkan hati banyak orang Papua, karena mereka tidak mengira Indonesia akan melancarkan perang terbuka yang banyak mendatangkan penderitaan fisik dan psikis dalam menghadapi protes mereka.

Ketika Brigjen Sarwo Edi menjadi Pangdam, digelar operasi baru yaitu operasi Wibawa dengan tugas utama adalah memenangkan Pepera untuk Indonesia. Tugas pokok dari operasi ini adalah menghancurkan kelompok perlawanan, mengamankan usaha memenangkan Pepera serta menumbuhkan dan memelihara kewibawaan pemerintah. Untuk tujuan itu, Kodam melakukan sinkronisasi operasi tempur, intelijen, dan teritorial. Sejalan dengan ini, Pangdam memerintahkan di setiap Kodim disiapkan kekuatan tempur agar bisa digunakan jika diperlukan.

Dalam kerangka memenangkan Pepera, OPSUS di bawah pimpinan Mayor Ali Moertopo³⁷ yang bergerak dalam bidang intelijen dan sosial-ekonomi berperan dominan dalam melakukan operasi teritorial untuk penggalangan. Dalam kerangka Operasi

³³ Lihat Jopari, *op cit*, 110-111 dan bandingkan dengan Irian Barat, *op cit*, hlm 125-128.

³⁴ Irian Barat, *op cit*, hlm. 130-134

³⁵ Irian Barat.... *op cit*, hlm. 141.

³⁶ *Ibid.*, hlm 144—145

³⁷ Ali Moertopo sejak tahun 1962 telah berada di Papua dengan jabatan Asisten I Dan Kotindo dan kemudian menjadi Asisten I Kodam. Asisten I adalah bidang intelijen Kodam.

Wibawa, kemenangan Pepera ke Kodam diperbantukan intelijen dari Den Dipiad dan intelijen dari Tim Karsa Yudha/RPKAD. Untuk memenangkan Pepera itu, intimidasi dan kekerasan telah memaksa sebagian orang memilih menjadi Indonesia. Secara keseluruhan, dalam operasi ini dilibatkan 6.220 orang pasukan.

Operasi kemenangan Pepera ini dibagi ke dalam 4 fase. Fase pertama adalah menghancurkan kelompok perlawanan dan sekaligus memperluas sebaran pasukan ABRI ke daerah-daerah yang telah dikuasai. Selain itu, di setiap Puterpa disiapkan 1 regu pasukan infantri untuk melakukan operasi teritorial. Fase kedua adalah memastikan di daerah-daerah Kepala Burung Pepera dimenangkan oleh Indonesia. Untuk ini, segenap unsur ABRI dilibatkan untuk mengeliminir kelompok perlawanan. Fase ketiga dan keempat adalah memastikan kemenangan pada hari H-nya dan mengamankan hasilnya.³⁸

Meski pun fase-fase itu telah disiapkan, ternyata upaya memastikan Pepera bisa dimenangkan oleh Indonesia tidak berjalan secara mulus. Di daerah Erambo (Merauke), Dubu/Ubrub (dekat perbatasan), Enaratoli dan Wahgete (Paniai) terjadi penolakan oleh masyarakat setempat. Para utusan pemerintah dan unsur ABRI yang ada di daerah itu dilawan oleh penduduk.

Di Enaratoli, perlawanan lebih hebat dengan melancarkan gerakan bersenjata serta terang-terangan menolak bergabung ke Indonesia yang dipimpin oleh A.R. Wamafma, Senen Mote, Maphia Mote, dan Thomas Douw. Perlawanan ini juga didukung oleh beberapa orang polisi asal Papua yang berpihak kepada kelompok perlawanan. Untuk menghentikan gerakan ini, Pangdam Sarwo Edi memerintahkan menghancurkan kelompok perlawanan. Untuk itu, pasukan Kopashanda dan pasukan dari Kompi 3,

Batalyon 724/Hasanuddin diterjunkan di Enaratoli untuk membantu pasukan yang ada di Kodim 1705/Nabire. Pasukan ini dalam operasinya didukung pula oleh Dipiad (Dinas Pelaksana Intelijen AD) dan Satgas AURI yang dilengkapi pesawat B 26, Dakota, dan Hercules. Pasukan Yon 724/Hasanuddin ini kemudian bergerak melancarkan operasi ke berbagai daerah di sekitar Paniai.³⁹ Operasi yang dipimpin oleh Mayor Mochtar Jahja dan Mayor Sitompul ini tidak mudah dilupakan oleh rakyat Paniai karena dalam operasi ini militer bertindak secara kasar dan membabi buta itu. Ditengarai ada sekitar 634 orang penduduk terbunuh sepanjang operasi itu.⁴⁰

Aksi perlawanan menjelang Pepera ini juga pecah di Pyramid, Wamena. Dua orang anggota ABRI dibunuh oleh penduduk. ABRI dalam peristiwa Pyramid ini melancarkan operasi intelijen dan teritorial untuk mencari pelakunya. Pasukan dari Satgas 3/Hasanuddin dikerahkan untuk menguasai kampung-kampung dan mencari pelaku.

Gencarnya operasi-operasi militer yang diperintahkan oleh Pangdam Sarwo Edi tidak terlepas dari fungsinya sebagai Ketua Proyek Pelaksana Daerah. Sesuai dengan surat Mendagri No. 30/1969, Pangdam bertanggung jawab atas pengendalian, penggerakan, dan koordinasi kegiatan semua aparatur pemerintah daerah, sipil, dan swasta dan ABRI di Papua. Dengan lain kata, Pangdam adalah penguasa tertinggi di Papua dalam menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh untuk memenangkan Pepera. Dalam posisinya sebagai Ketua Proyek, Pangdam melancarkan usaha-usaha peningkatan operasi tempur di semua lini untuk menghancurkan perlawanan, melakukan operasi teritorial untuk penggalangan kondisi bagi kemenangan Pepera dan mengintensifkan operasi intelijen untuk mematahkan sisa-sisa gerakan separatis. Selain

³⁸ *Ibid.*, hlm. 170—174

³⁹ *Ibid.*, hlm. 182—183.

⁴⁰ Mengenai korban dari penduduk Paniai ini, lihat Pigay, *op cit.*, hlm. 343—344.

itu, melakukan operasi pengamanan objek vital dan tempat-tempat sidang Dewan Pepera.⁴¹

Sejalan dengan kemenangan Indonesia dalam Pepera, ABRI melakukan pula fungsi-fungsi sosial-politiknya. Untuk itu, Kodam melancarkan program penggantian para pejabat kabupaten dan dinas-dinas yang dilihat diragukan loyalitasnya pada Indonesia. Bersamaan dengan ini, keanggotaan DPRD I dan II melakukan penyusunan ulang dengan memasukan anggota ABRI menjadi anggota atau pimpinan dewan. Dalam konteks ini, pasukan ABRI juga dirapatkan di kampung-kampung untuk mengawasi kehidupan masyarakat secara langsung. Di samping itu, juga melancarkan proyek civilisasi dan kesehatan bekerja sama dengan zending dan misi yang telah ada. Dalam bidang ekonomi, Kodam juga turut serta melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan mengontrol arus dan harga barang. Semua kegiatan ini disebut sebagai kegiatan *civic mission* ABRI di Papua.⁴²

Setelah memenangkan Pepera, 29 Januari 1970 Brigjen Acub Zainal ditunjuk menjabat Pangdam Tjendrawasih. Di tangan Pandam baru ini, organisasi Kodam menjadi 3 Korem, 9 Kodim, dan 3 Yonif. Yonif 751/Tjendrawasih di Arfai, Manokwari berasal dari Kodam Diponegoro dengan status tugas jangka panjang. Yonif 752/Tjendrawasih di Sorong berasal dari Kodam Siliwangi dan Yonif 753/Tjendrawasih di Ifar Gunung, Jayapura berasal dari Brawijaya ditambah prajurit asli orang Papua. Ketiga Yonif ini dikembangkan menjadi pasukan organik Kodam Tjendrawasih. Sementara pasukan-pasukan ABRI dari kesatuan lainnya yang berasal dari luar Papua mengalami rotasi penugasan. Pasukan lama pulang dan diganti dengan pasukan baru dari asal kesatuan yang sama. Reorganisasi ini juga sejalan dengan reorganisasi Kopkamtibda di Irian Jaya. Semua ini dipersiapkan untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 1971.

Pemilu 1971 ini merupakan pemilu pertama Indonesia di bawah kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto. Pemilu ini juga merupakan pemilu pertama bagi orang Papua dalam kekuasaan Indonesia. Dalam mempersiapkan Pemilu 1971 ini, Kodam juga menghadapi perlawanan, terutama di Biak Utara dan Barat, serta di kepala burung Manokwari. Untuk menghentikan perlawanan tersebut dilancarkan operasi militer. Sandi operasi adalah Operasi Pamungkas dengan pendekatan pada operasi teritorial yang dibantu tempur dan intelijen. Pelaksana Operasi adalah Kodim Biak yang dibantu pasukan tempur dari Yonif 753 dan 752/Tjendrawasih serta Dipiad. Operasi di Biak ini dipimpin oleh Dandim Biak Mayor R.A. Hendrik dan Mayor Puspito yang juga Komandan Yon 753.⁴³

Bulan Juli 1971 ini, Kodam juga melancarkan Operasi Pamungkas di Manokwari untuk mengejar Ferri Awom yang belum menyerah. Operasi ini dipimpin oleh Danyongab Satgas 3/Merdeka, Mayor Ahmad. Kemudian digantikan oleh Letkol S. Mardjan. Dalam Operasi ini terlibat pasukan dari Satgas 3/Merdeka dan 1 peleton dari Yon 751 dan 1 peleton dari Kompi 753. Batalion-batalion bertugas mengejar kelompok perlawanan sepanjang hari selama berbulan-bulan, siang, dan malam. Dalam pengejaran ini Kapten Sahala Rajaguguk berhasil membujuk Ferry Awom untuk turun menyerah dengan 400 orang anggotanya.⁴⁴

Operasi militer yang masif di tahun 1971 ini alih-alih membuat sentimen anti Indonesia surut, malah perlawanan berkembang ke berbagai kota dalam bentuk penyerangan terhadap pos-pos ABRI dan pemerintahan. Melihat perlawanan menguat, Kodam kian memperkuat kekuasaannya di Papua dengan menutup Papua bagi media. Suasana ketakutan merajalela di santero Papua. Selama menjelang dan sesudah Pemilu 1971 tidak ada satu pun orang di

⁴¹ Irian Barat, *op cit.*, 202—203.

⁴² *Ibid.*, 217—218.

⁴³ *Ibid.*, hlm 239 dan 241—243.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 245.

Papua berani mempersoalkan ketidakadilan atau tindakan-tindakan anggota militer yang menyakitkan hati mereka.

Atmosfer ketakutan itu muncul dari tindakan militer Indonesia yang selalu melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap daerah-daerah yang ditengarai sebagai basis OPM. Dalam melakukan serangan, ABRI kerap melibatkan pasukan dalam jumlah besar dengan dibantu oleh pesawat pembom Bronco dan helikopter bersenjata. Serangan besar-besaran itu tidak saja mengejar anggota OPM yang mencoba menyerang pos-pos ABRI, melainkan kerap kali menelan korban jiwa dari penduduk kampung yang tidak terlibat dalam OPM.

Banyaknya korban jiwa di akhir tahun 1970-an ini juga disebabkan oleh sikap militer Indonesia sendiri yang tidak pernah secara jelas memosisikan OPM sebagai gerakan kemerdekaan. OPM hanya dilihat sebagai gerakan kriminal yang disebut sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Dengan cara seperti ini, setiap korban jiwa yang jatuh dari kalangan orang-orang Papua dengan mudah diklaim oleh militer sebagai anggota OPM.⁴⁵

Menjelang Pemilu 1977 kembali perlawanan dilancarkan oleh kelompok-kelompok OPM di Papua, terutama di daerah Kobagma, Bokondini, Mulia, Ilaga, Pyramid, Kabupaten Jayawijaya. Perlawanan ini dipicu oleh penempatan kesatuan-kesatuan ABRI di hampir seluruh wilayah Papua. Operasi-operasi militer untuk mematahkan perlawanan menjelang Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978 ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, perlawanan juga pecah di Enarotali, Biak, dan Mimika serta di sepanjang daerah perbatasan dengan PNG. Era ini dianggap oleh orang Papua

sebagai era awal status Daerah Operasi Militer bagi Papua diterapkan.⁴⁶ Pangdam Tjendrawasih waktu ini dijabat oleh Brigjen Imam Munandar.

Di Jayawijaya, terutama di daerah sekitar Tiom dan Kwiyawage yang merupakan lembah-lembah di Baliem dilangsungkan pula operasi militer untuk menghentikan perlawanan dan mempersiapkan Pemilu 1977. Operasi dilancarkan di bulan April dan Juni. Perlawanan orang Ndani di daerah ini diawali oleh perasaan tidak suka Suku Ndani terhadap kebijakan Indonesia yang memaksa mereka berganti pakaian. Sekitar 15.000 orang berkumpul melakukan protes. Perlawanan ini diawali oleh Operasi Koteka yang dilancarkan untuk mengadabkan orang-orang di daerah itu. Di Tiom sekitar 4.000 orang melawan dengan cara menyerang pos pemerintah di daerah itu. Kemudian ke daerah ini diterjunkan pasukan khusus dari RPKAD dengan didrop dari helikopter. Selain itu, para penduduk yang mencoba menyelamatkan diri ke hutan-hutan dihujani tembakan dari udara.⁴⁷

Di areal PT Freeport di Timika bulan Juli 1977 juga terjadi gejolak. Penduduk setempat yang ditengarai digerakkan oleh OPM juga melancarkan serangan terhadap pipa-pipa dan fasilitas PT Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu. ABRI membalas aksi penduduk itu dengan melakukan penembakan dari udara menggunakan pesawat Bronco.⁴⁸ Setelah itu, ke berbagai deretan kampung di sekitar Agimuga diterjunkan pasukan infantri dari Batalion 753/Tjendrawasih untuk mengejar penduduk dan membakar perkampungan. Implikasi dari aksi kekerasan ini penyelenggaraan

⁴⁵ Mengenai ini lihat Ikrar Nusa Bhakti, "Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi." dalam Dewi Fortuna Anwar (Ed.), *Konflik Kekerasan Internal*, Obor, Jakarta, 2005, hlm. 255—256.

⁴⁶ Kesan Papua sebagai DOM terlihat dalam tulisan Pastor Neles Keadabi Tebay, Pr, "Orang Papua Menuju Kepunahan," makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Gaise, Keuskupan Bandung dan Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, tanggal 12—13 November 1999.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 139—144. Bandingkan dengan Yorris TH Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, PDP, Jayapura, 2002, hlm. 121—122.

⁴⁸ Samsudin, *op cit.*, hlm. 51—52.

Pemilu 1977 di beberapa kampung di daerah pegunungan ini terpaksa ditunda.⁴⁹

Robin Osborne mencatat operasi militer di tahun 1977—1978 adalah operasi militer paling buruk. Dalam setiap operasi pengejaran terhadap mereka yang disebut kelompok OPM diterjunkan pasukan dalam jumlah besar yang berintikan kesatuan RPKAD dan pasukan angkatan darat lainnya. Di daerah selatan Jayapura yang berdekatan dengan perbatasan yang dikenal sebagai daerah Markas OPM diterjukan 10.000 orang tentara setelah daerah itu dibombardir dari udara oleh dua pesawat Bronco. Dalam penyerangan ini, diperkirakan 1.605 orang para pendukung OPM dan penduduk di wilayah itu tewas.⁵⁰ Operasi militer di tahun-tahun ini selalu diingat oleh orang-orang tua di daerah itu, sebagai kenyataan paling pahit dalam hidup mereka.⁵¹

Sepanjang tahun 1977—1978 itu, Dubes Indonesia untuk PNG memperkirakan 1.800 orang pasukan dikerahkan beroperasi di hutan-hutan untuk melakukan pengejaran dan 3.000 orang siaga berada di Jayapura untuk setiap saat menggantikan.⁵² Menyadari operasi militer itu telah menciptakan ketakutan dan menelan banyak korban jiwa yang tidak perlu, Panglima ABRI kala itu, Jenderal M. Yusuf, mengumumkan akan mengurangi operasi militer di Papua dengan mengintrodusir kebijakan baru yang dikenal dengan kebijakan Operasi Senyum. Dalam Operasi Senyum ini dinyatakan Indonesia tidak akan melancarkan operasi besar-besaran, karena OPM mulai dilihat kecil dan tidak membahayakan. ABRI hanya akan

melancarkan patroli di perbatasan dan tugas keamanan rutin.⁵³

Gejolak kembali membunyah di tahun 1980-an, terutama sekitar tahun 1984. Di tahun 1980-an Kodam telah dinyatakan sebagai Kotama dalam jajaran AD. Panglima Kodam menjadi pimpinan di daerah untuk seluruh jajaran komando. Pangdam dalam reorganisasi organisasi ABRI ini langsung berada di bawah Panglima ABRI. Sejalan dengan itu, Panglima ABRI juga memiliki komando langsung kepada Kotama AD lainnya, yaitu Kostrad dan Kopassus. Oleh karena itu, di era ini kerap kali operasi militer melibatkan pasukan-pasukan dari Kostrad dan Kapassus dengan perintahnya langsung dari Panglima ABRI, dan Kodam hanya memfasilitasi. Kenyataan ini kemudian dikenal dengan nama pasukan BKO (bawah kendali operasi).⁵⁴ Di era ini, Papua juga tertutup bagi media sehingga banyak operasi yang dilancarkan oleh militer tidak diketahui oleh orang luar. Robin Osborne menyebut keadaan ini sebagai perang rahasia Indonesia di Papua.

Di awal tahun 1980-an, Kopkamtib mengeluarkan analisis bahwa kekuatan OPM telah mengecil dan terpecah-pecah ke dalam kelompok kecil-kecil dengan senjata yang sangat terbatas. Meskipun demikian, Laksusda Irian Jaya kala itu juga melihat gerakan kelompok-kelompok OPM itu kembali mulai aktif setelah menerima pukulan telak sepanjang tahun 1977—1978. Gerakan OPM itu aktif sepanjang daerah perbatasan dengan PNG. Antara bulan Maret dan Juni 1984, pasukan dari Kopasandha (Kopassus) mulai melakukan penyusupan ke daerah-daerah sekitar perbatasan.

Aksi pasukan baret merah ini adalah dengan melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang dicurigai. Osborne mencatat gerakan pasukan ini sangat menakutkan penduduk sekitar perbatasan karena perlakuan buruknya terhadap

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 149—150.

⁵⁰ Robin Osborne, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 134—135.

⁵¹ Operasi militer di tahun 1977 ini selalu dijadikan patokan oleh orang di Mimika dan Jayawija serta Enarotali sebagai awal mereka menjadi korban dari kekerasan militer. (Pembicaraan pribadi dengan Mama Yosepha tahun 1996 dan Pendeta Perminus Kogoya di Wamena tahun 2003).

⁵² *Ibid.*, hlm. 152.

⁵³ Bhakti, *op cit.*, hlm. 256. Lihat juga Osborne, *op cit.*, hlm. 153.

⁵⁴ Reorganisasi ini dilakukan oleh Panglima ABRI Benny Moerdani setelah menggantikan M. Yusuf di tahun 1983.

penduduk. Akibatnya, ratusan orang melarikan diri ke daerah PNG karena takut. Pengungsian ke PNG di tahun 1984 ini kian banyak ketika Suku Muyu di Mindiptana, Woropko, dan Merauke juga masuk ke PNG. Pengungsian Suku Muyu ini dipicu oleh kehadiran pasukan ABRI, yaitu intelijen Kopassus di daerah itu untuk mencari anggota OPM setelah terjadinya penyerangan pos ABRI di desa Kanggewot dan Kakuna tanggal 11—12 April 1984. Gerakan suku Muyu ini kemudian juga diikuti oleh penduduk dari daerah lainnya, yaitu dari Jayapura, Wamena, Sorong, Mimika (Amungme), Manokwari, dan Fak-fak. Seluruh pengungsi asal Papua yang masuk ke PNG ini diperkirakan mencapai 10.000 orang.⁵⁵ Sementara Yafet Kambai mencatat dari seluruh pengungsi itu hanya sekitar 7.500 berhasil masuk ke PNG dan 1.900 orang berdiam diri di hutan-hutan sekitar perbatasan. Seluruh pengungsi ini ditempatkan di kamp East Aswin dan Western Province, PNG.⁵⁶

Gerakan pengungsian ke PNG, selain faktor operasi militer di daerah perbatasan itu, juga disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu aktifnya OPM di daerah itu, munculnya rasa kecewa karena macetnya pembangunan, banyaknya operasi intelijen, dan masuknya arus transmigrasi secara besar-besaran ke Papua terutama di sekitar daerah perbatasan.⁵⁷ Transmigrasi yang di dalamnya juga masuk keluarga ABRI dan para pensiunan ABRI kian membuat orang takut sekaligus merasa tanahnya dirampas. Para purnawirawan ABRI yang ikut dalam pemukiman transmigrasi sekaligus menjadi intel Kodam dalam mengawasi daerah itu.⁵⁸ Daerah-

daerah transmigrasi ini seperti di Arso dan Koya atau di beberapa daerah di Merauke dijadikan pula sebagai daerah penyangga bagi OPM dan memudahkan ABRI untuk melakukan patroli di daerah itu.⁵⁹

Pengungsian ke PNG di tahun 1983—1984, juga dipicu oleh banyaknya terjadi penangkapan-penangkapan di kota-kota Papua, terutama Jayapura oleh intelijen Kopasandha. Mereka yang ditangkap ada 20 orang yang berasal dari Uncen dan pegawai Gubernur Irian Jaya. Salah seorang dari mereka adalah Arnold Ap yang menjabat sebagai Kepala Museum Antropologi Uncen. Penangkapan ini menimbulkan keresahan di Jayapura. Akibatnya, banyak dari para mahasiswa Uncen dan pegawai di pemerintah daerah lari ke PNG. Bahkan di Jakarta, tiga orang sahabat Arnold Ap yang memprotes penangkapan dan pembunuhan Arnold oleh Kapassus ke DPR-RI terpaksa meninggalkan Jakarta.⁶⁰

Setelah pelarian besar-besaran ke PNG tahun 1984 ini, gerakan perlawanan dari OPM betul-betul surut. Namun, ABRI yang kian merasa berkuasa atas Papua tidak bisa meninggalkan cara-cara kekerasan untuk menunjukkan dominasinya. Stigma OPM dieksploitasi sedemikian rupa untuk melumpuhkan siapa saja yang dianggap menentang Indonesia. Tindakan kekerasan itu kerap pula dipakai setiap menjelang pemilu demi memenangkan Golkar di Papua.

Operasi militer setelah tahun 1984 berjalan secara lebih masif, namun aksi kekerasan dalam operasi itu tidak diketahui oleh publik di luar Papua karena media massa dilarang memberitakannya. Kemasifan operasi itu ditopang oleh kebijakan ABRI yang menjadikan yonif sebagai kekuatan inti tempur dengan pasukan tambahan dari Jakarta atau Makassar dan Maluku yang di-BKO-kan ke kodam. Di tahun 1984 ini, kodam memilik 6 yonif, 3 di Papua dan 3 yonif

⁵⁵ Osborne, hlm. 236.

⁵⁶ Theo van den Broek, *Returnees from PNG to Irian jaya: Dealing in Particular with Returnees to Woropko-Mindiptana Area*, SKP Jayapura, Januari 1999. Juga lihat Yafet Kambai, *Gerakan Papua Merdeka di Bawah Bayang-Bayang Mega-Haz*, ELSHAM, Jayapura, 2003, hlm. 29—30.

⁵⁷ Van den Broek, *ibid.*, hlm. 4.

⁵⁸ Kodam menyebut tugas para purnawirawan dalam pemukiman itu adalah menjadi mata dan telinga Kodam dalam bidang keamanan, Lihat, *Sejarah Kodam VIII/ Trikora Priode 1982—1990*, hlm. 82—83.

⁵⁹ Bhakti, *op cit.*, hlm. 257, dan Osborne, hlm. 280.

⁶⁰ George. J. Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora*, ELSAM, Jakarta, 2000, hlm. 24—25.

di Maluku sebagai hasil penggabungan kodam. Dari 3 yonif di Maluku, satunya adalah Yonif Linud 733 di Ambon yang berkualifikasi para. Yonif dari Maluku ditugaskan melakukan operasi secara bergantian, sementara yonif di Papua melakukan operasi sepanjang tahun di bawah kendali korem.⁶¹

Papua sebagai daerah operasi, satuan intelijen kodam dan jajarannya memegang peranan yang besar untuk menghancurkan gerakan yang disebut separatis. Oleh karena itu, peranan intelijen dan operasi kontra intelijen selalu aktif sepanjang tahun. Para intelijen dari kodam dan korem direkrut dari anggota satuan tempur yang memiliki naluri intelijen dan kemudian dilatih 3 sampai 10 hari sebelum diterjunkan mengumpulkan informasi. Selain itu, anggota intelijen ini latihan sambil bertugas bersama dengan intelijen tempur yang datang dari Kopassus.

Operasi-operasi di masa ini adalah Operasi Gagak I (1985—1986) yang dipimpin oleh Pangdam Mayjen H. Simanjuntak. Dalam operasi ini, pasukan operasi dibagi ke dalam sektor A di perbatasan, B di tengah dan C kepala burung dengan komando Korem masing-masing. Danrem adalah komandan sektor operasi. Kodim menjadi subsektor dengan Dandim sebagai Dansubsektor. Titik tekan operasi adalah teritorial dengan didukung oleh operasi intelijen dan tempur serta kamtibmas.

Sektor A1 meliputi daerah Kodim 1701/Jayapura, yaitu Membramo, Arso, Waris, Senggi, Kemtuk dan Demta. Pasukan yang dikerahkan di daerah ini adalah Yonif 733/BS, satu kompi dari Yonif 751, 9 tim intelijen, aparat teritorial setempat serta dibantu oleh 2 SSK Wanra. Sementara A2 meliputi daerah Kodim 1702/Wamena dengan kekuatan pasukan dari 1 regu Yonif 751, 2 peleton KiZipur-4/Diponegoro, 2 peleton Senzipur 10 serta pasukan teritorial setempat berserta 2 SST wanra/hansip. A3 adalah daerah Kodim 1707/

Merauke dengan sasaran utama adalah desa Mendiptana dan Waropko. Pasukan yang diterjunkan di daerah ini adalah 1 kompi Yonif 751, 1 peleton Zipur 4/Diponegoro, 1 peleton Denzipur 10, dan aparat teritorial yang dibantu oleh 2 SST wanra/hansip.

Daerah operasi sektor B adalah meliputi daerah Korem 173/PVB, dengan *hot spot* operasi di Nabire. Sasaran utama adalah Enarotali dan Kebo, Ilaga. Operasi ini bertujuan memburu pimpinan OPM, yaitu Daniel Kogoya, Tadius Yogi, dan Simon Kogoya. Pasukan yang dikerahkan ke daerah ini adalah 1 peleton Yonif 753, 1 peleton Zipur 4/Dip dan Apter setempat dan dibantu oleh 2 SST hansip/wanra.

Sektor C adalah daerah Fak-fak dengan fokus operasi di daerah C3, yaitu daerah kompleks Tembapapura, Agimuga, dan Timika. Pimpinan OPM yang hendak dikejar di daerah tambang PT Freeport ini adalah Vicktus Wangmang dengan mengerahkan pasukan dari Yonif 752 dengan kekuatan 2 kompi dibantu Apter dan 2 SST hansip/wanra.⁶² Dalam Operasi Gagak I ini, Kodam mencatat 14 orang yang diduga OPM berhasil dibunuh dan 8 orang ditangkap dengan menyita 2 pucuk senjata.

Memasuki tahun 1986 operasi ini dilanjutkan Pangdam Mayjen Setiana dengan sandi Operasi Gagak II (1986—1987) dengan tugas pokok penghancuran GPK. Titik tekan operasi adalah operasi teritorial dan intelijen untuk memisahkan GPK dari rakyat serta melakukan deteksi loyalitas rakyat terhadap pemerintah. Operasi intelijen melakukan penggalangan agar loyalitas rakyat meningkat. Operasi tempur terus dijalankan dengan menggelar patroli untuk mengejar dan menghancurkan. Operasi dilancarkan dengan tetap membagi daerah operasi ke dalam 3 sektor. Pasukan yang dilibatkan dalam Operasi Gagak II ini adalah seluruh pasukan organik tempur dan teritorial Kodam VIII/Trikora. Serta pasukan BKO dari Satgas

⁶¹ *Sejarah Kodam VIII/Trikora, Priode 1982—1990*, Kodam, Jayapura, 1990, hlm. 76.

⁶² Kodam VIII/Trikora, *op cit.*, hlm. 108—109.

Yonif 321/Kostrad, 6 Tim Intelpur Kostrad, 1 Kompi Yonzipur/Dip, 1 Kompi Yon Zipur/Brawijaya, satuan dari TNI AL dan AU serta Penerbad. Selama operasi ini, ABRI melaporkan 21 orang berhasil dibunuh, 5 ditangkap dan menyerah 12 orang dengan menyita 13 pucuk senjata.⁶³

Ketika Mayjen Wismoyo Arismunandar menjadi Pangdam Trikora digelar operasi dengan sandi Operasi Kasuari 01 (1987—1988), yaitu Juni 1987 sampai Mei 1988 dengan tugas utama menghancurkan GPK secara fisik, terutama di sekitar daerah perbatasan. Selain itu, operasi juga ditekankan di Kabupaten Jayapura, Paniai, Fak-fak dan Biak. Perkiraan ABRI waktu ini kekuatan OPM hanya 222 orang dengan 64 pucuk senjata campuran. Akan tetapi, operasi digelar dalam 3 sektor dengan Danrem tetap sebagai komandan sektor. Untuk daerah subsektor A1 yang meliputi perbatasan di Kabupaten Jayapura dikerahkan pasukan dari Satgas Yonif 321/Kostrad, Satgas Patimura II, 2 peleton Yonif 751, tim Yonif 752, tim analisis Kopassus, tim Intelpur Kostrad, Satgas Intel Laksusda, satu peleton Kizipur 4/Diponegoro, 1 kompi Zipur 5/Brawijaya dengan dibantu 4 SSK wanra sebagai TBO. Sementara untuk Subsektor A2, Wamena dikerahkan 1 Ton Yon 751, 1 Ton Zipur 5/Brawijaya, 1 tim Intelpur Kostrad, 1 Ton Plus Satgas 642/Tanjungpura dan dibantu SST wanra. Sementara di sektor A3, yaitu Merauke dikerahkan pasukan 1 Ton Yonif 751, dan 1 Ton Zipur 5/Brawijaya, Satgas Intel Laksusda dan Tim Intelpur Kostrad dan 2 SST wanra.⁶⁴

Di daerah operasi subsektor B1, Nabire sasaran adalah Enarotali dan Sugapa, dengan menerjunkan pasukan dari Yonif 753, Intel Laksusda, Kizipur 4/Diponegoro, peleton Intelrem 173, Ru Marinir, 1 peleton Kopaskhas AU, 1 Tim Khusus Kodim Nabire dan 2 SSK wanra. Kampung yang menjadi

sasaran adalah Kampung Tagitakaida, Seruai, Kampung Swaipak, Ampobukar, Supriori dan Swainober, Biak Barat. Selain itu juga di desa Hitadipa, Kecamatan Komopa, Kecamatan Sing, Desa Sapolinik, Kecamatan Sinak dan Lereh, Nabire. Begitu juga Desa Tamakuni, Waropen. Pimpinan OPM yang dikejar di daerah ini adalah Tadius Yogi dan Simon Kogoya.

Sementara itu di sektor C, pasukan dikonsentrasikan untuk patroli tempur dan penjagaan areal PT Freeport serta Kecamatan Agimuga dan kampung Jila. Pasukan yang dikerahkan adalah berasal dari Yonif 752 satu kompi, Yonif 753 satu regu, Ton Intelrem 171, Satgas Intel Laksusda dibantu satu SSK wanra. Semua pasukan di-BKO-kan kepada Kodim 1706/Fak-fak.⁶⁵

Operasi militer ini kemudian dilanjutkan dengan Operasi Kasuari 02 (1988—1989). Operasi ditekankan di sepanjang perbatasan dengan PNG dengan titik tekan operasi teritorial, intelijen dan tempur serta kamtibmas. Operasi teritorial diarahkan untuk membentuk desa binaan agar rakyat berpihak pada ABRI. Pasukan yang bertugas dan sektor operasi sama dengan Operasi Kasuari 01. Kelly Kwalik muncul sebagai pimpinan OPM di daerah Agimuka dan Tembagapura di masa Operasi Kasuari 02 ini.

Mayjen Abinowo setelah menggantikan Wismoyo Arismunandar menggelar Operasi Rajawali 01 (1989—1990) dan Operasi Rajawali 02 (1990—1991). Operasi tetap ditujukan untuk penghancuran OPM di sepanjang perbatasan dengan PNG. Jenis operasi adalah teritorial, intelijen dan tempur secara terpadu dan serentak. Operasi teritorial diarahkan untuk pembentukan desa binaan dengan tujuan memisahkan rakyat dari GPK. Sementara operasi intelijen ditujukan untuk mengidentifikasi gerakan GPK dan menetralkan pengaruhnya. Sementara itu, operasi tempur melancarkan patroli, pengejaran, dan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 111.

⁶⁴ *Ibid.*, Kodam, hlm. 114—115.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 116—117.

penghancuran. Pasukan yang terlibat dalam operasi ini adalah pasukan organik Kodam VIII ditambah Yonif 621/Tanjungpura, Yonif 431/Brawijaya, (diganti Yonif 310/Siliwangi), 1 tim Intelpur Kostrad, Satgas Dampak XX Kopassus, Satgas Udara 3 Heli Puma, 1 Cassa AL, dan 32 Polsek, dan 6 SSK wanra. Di masa inilah, Thomas Wangai mengibarkan Bendera Melanesia Barat di Jayapura.

Memasuki tahun 1990, kekuatan OPM diperkirakan hanya 215 orang dengan 69 pucuk senjata campuran. Konsentrasi gerakan berada di sepanjang perbatasan dan sebagian tersebar di Kabupaten Jayapura, Biak, Yapen-Waropen, Fak-fak, Merauke. Pada periode ini, ABRI telah membagi empat kelompok GPK, yaitu politis, orang hutan, rakyat pendukung, dan *clandestine* yang berada dalam Pemda I dan II, perguruan tinggi, dan SLTA.⁶⁶ Pasukan pendukung operasi ini adalah pasukan organik Kodam tambah 32 Koramil rawan, yaitu Satgas Yonif 732 asal Maluku, Satgas Ki. Denzipur 10, 1 Ki. Yon 751, 752, 753, Satgas Intel, dan ditambah pasukan nonorganik, yaitu Satgas Yonif 621, 431, 310, tim Intelpur Kostrad, Den Kopassus, dan Satgas Udara.

Di tahun 1990 inilah, operasi intelijen militer yang berintikan pasukan Kopassus di Papua meningkat. Penangkapan-penangkapan yang disertai pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai OPM kerap terjadi di berbagai tempat.

Operasi jenis ini kemudian terkuak ketika terjadi serangkaian pembunuhan terhadap penduduk kampung di desa Wea, Tembagapura di bulan Oktober sampai Desember 1995. Dalam aksi ini, pasukan dari Yonif 752 melakukan penembakan membabi buta terhadap penduduk yang sedang berada dalam rumah-rumah mereka. Tindakan ABRI itu diawali oleh adanya demonstrasi beberapa bulan sebelumnya dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dalam peristiwa ini, 11 orang terbunuh dan beberapa orang lainnya ditangkap dan kemudian disekap di kontainer milik PT

Freeport. Sebagian dari penduduk di kampung-kampung itu juga mengalami penyiksaan.⁶⁷ Aksi kekerasan yang sama juga terjadi di Mapenduma ketika pasukan Kopassus mencoba membebaskan orang-orang yang disandera oleh kelompok Yudas Kogoya dan Kelly Kwalik.

Operasi militer dengan tujuan untuk memburu kelompok yang disebut OPM kembali terjadi di tahun 2003 tepatnya antara bulan April sampai Juni dan kemudian terus bertahan sampai Oktober⁶⁸ di Wamena. Dalam operasi pengejaran di tahun 2003 ini diterjunkan pasukan dari Kopassus dan Kostrad yang di BKO-kan kepada Korem 171/Jayapura.

Operasi militer ini diawali oleh terjadinya pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena oleh sekelompok orang bersenjata dini hari tanggal 4 April 2003. Untuk mengejar kelompok bersejata itulah operasi ke kampung-kampung di seputaran kota Wamena dilancarkan. Pengejaran bahkan sampai ke daerah Kwiyawage. Mereka yang ditangkap di sekitar kota Wamena ditahan di Kodim dan kemudian mengalami penyiksaan yang luar biasa.

Di kampung-kampung yang dilewati pasukan TNI ini terjadi rangkaian kekerasan terhadap penduduk. Namun, tindakan kekerasan yang luar biasa dilakukan pasukan TNI terjadi di Kwiyawage. Kampung-kampung yang diperkirakan berpenduduk hampir 7.000 jiwa ini dihujani tembakan dan rumah-rumahnya dibakar. Ribuan penduduknya yang berhasil ditangkap mengalami penyiksaan dan beberapa orang di antaranya dibunuh.⁶⁹ Ketika penulis datang ke

⁶⁷ Amiruddin, *op cit.*

⁶⁸ Pada bulan Oktober, TNI berhasil membunuh Justinus Murib bersama 6 orang pengawalnya di Kampung Bolakme, Wamena. Justinus dianggap sebagai Pimpinan OPM di Wamena dan memimpin pembobolan gudang senjata Kodim dan membunuh dua orang anggota TNI di areal Kodim.

⁶⁹ Lihat Laporan Lengkap Tim Pengkajian Permasalahan HAM di Papua, Komnas HAM, 2003.

⁶⁶ Kodam VIII, hlm. 126.

Kampung Kwiyawage ini di bulan September 2003, kampung ini masih kosong dan sisa-sisa pembakaran dan pengrusakan masih terlihat jelas.⁷⁰

Operasi militer yang paling mengejutkan setelah DOM dicabut di Papua adalah tindakan Kopassus di tahun 2001, yaitu membunuh Theis H. Eluay di Jayapura. Pembunuhan itu dilakukan setelah Theis diundang Kopassus ke markasnya di Hamadi, Jayapura. Mayatnya kemudian dibuang di jurang pingir jalan di daerah Koya. Sampai hari ini, pembunuhan Theis ini belum terungkap siapa yang memerintahkannya. Yang jelas, seorang letkol dan seorang mayor Kapassus divonis oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya sebagai penanggung-jawabnya. Metode pembunuhan terhadap Theis bukanlah metode baru di Papua. Ratusan orang di Papua dibunuh dengan cara seperti itu, baik di kampung-kampung maupun di kota di seluruh Papua.

Sebenarnya ketika memasuki era reformasi politik Indonesia di tahun 1998, OPM tidak berarti lagi secara politik karena tidak memiliki kekuatan senjata yang memadai. Bahkan, para anggotanya terpecah-pecah dan banyak yang bertalian dengan aparat TNI. Maka dari itu ketika menjabat Menkopolkam, SBY menyatakan OPM bukanlah ancaman yang serius. Namun, aksi kekerasan oleh TNI di Papua tidak pernah surut.

5. Penutup: Hak Asasi Manusia Agenda yang Tersisa

Rangkaian operasi militer yang terpapar di atas jika disimak dalam literatur resmi Indonesia terdapat kesan bahwa operasi itu berjalan mulus tanpa cela. Seluruh operasi itu digelar semata-mata untuk mematahkan perlawanan Gerakan Pengacau Liar atau Gerakan Pengacau Keamanan. Tetapi, banyak saksi di Papua menyatakan dalam seluruh

operasi itu banyak korban jiwa jatuh dari penduduk biasa di kampung-kampung serta puluhan orang Papua yang terpelajar dipenjarakan.⁷¹

Ketika situasi politik berubah, rangkaian Operasi Militer di Papua, digugat oleh orang-orang Papua karena mereka mencatatnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Ternyata dalam operasi militer yang tiada putus itu yang dibunuh, disiksa, dan dihilangkan atau diperkosa bukanlah sekadar musuh negara, melainkan ratusan penduduk kampung yang daerahnya menjadi sasaran operasi militer tersebut.

Antara tahun 1963—1969 korban orang Papua oleh operasi militer diperkirakan oleh Osborne dengan mengutip Hasting berjumlah 2.000 sampai 3.000 orang. Sementara Eliaser Bonay mantan Gubernur Papua di tahun 1981 pernah menyatakan korban berkisar 30.000 jiwa.⁷² Jan Warinussy Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari memperkirakan jumlah korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera sampai sekarang.⁷³

Namun, jumlah korban yang moderat ditulis oleh Agus Sumule ketika merumuskan perlunya Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dijamin pembentukannya dalam UU Otonomi Khusus untuk Papua. Sumule merinci jumlah korban tersebut adalah antara tahun 1969—1997 di Paniai 614 orang dibunuh. Hilang 13 orang dan diperkosa 80 orang (1980—1995). Tahun 1979 Kelila (Jayawijaya) 201 dibunuh, serta tahun 1977 di Asologaiman, 126 dibunuh, dan Wasi 148 orang dibunuh.⁷⁴ Jumlah korban pembunuhan oleh aparat dalam rangkaian operasi militer itu belum teridentifikasi secara jelas sampai saat ini. Meskipun demikian,

⁷¹ Mendesaknya masalah hak asasi manusia untuk diselesaikan di Papua, lihat Adriana Elisabeth, *Agenda dan Potensi Damai di Papua*, LIPI, Jakarta, 2005.

⁷² Osborne, *op cit.*, hlm. 109.

⁷³ Lihat wawancaranya dalam *Majalah Sampari*, edisi 02/Februari 2006, hlm. 11—13.

⁷⁴ Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Gramedia, Jakarta, hlm. 233—234.

⁷⁰ Kwiyawage berjarak sekitar 45 menit terbang dengan helikopter. Penulis datang ke kampung ini sebagai anggota penyelidik *ad hoc* KPP-HAM Komnas HAM.

masalah hak asasi manusia yang serius telah terjadi di Papua.

Menyikapi masalah hak asasi manusia yang serius itu, ketika fajar tahun 2000 mekah, Presiden Abdurrahman Wahid yang kala itu berada di Jayapura mengubah nama provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. Seiring dengan perubahan nama itu, Presiden juga memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora dan meminta TNI menggunakan jalan damai dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyikapi masalah di Papua. Setahun kemudian, status Otonomi Khusus juga disetujui oleh Presiden Megawati kepada Papua melalui UU No. 21/2001.

Jalan dialog ini mulai terbuka karena munculnya gelombang protes yang tiada henti di Papua sepanjang tahun 1998. Gelombang itu dimulai oleh para kalangan mahasiswa di Jayapura dan kemudian menjalar ke hampir semua kota di Papua. Titik cetusnya terjadi di Biak, bulan Juli 1999. Ribuan orang berdemonstrasi dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Pelabuhan Biak. Demonstrasi kemudian juga menyebar ke kota-kota Papua lainnya, seperti Manokwari, Wamena, Merauke, Timika, dan Jayapura. Sayang dalam berbagai aksi demonstrasi yang diikuti pengibaran bendera Bintang Kejora ini, lagi-lagi, aparat keamanan bertindak secara kasar.⁷⁵ Sepanjang tahun 2000, demonstrasi-demonstrasi yang menuntut keadilan dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora juga mengalami tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. Sepanjang tahun 1999—2000, puluhan orang tewas tertembak oleh aparat.⁷⁶

Sayangnya, seluruh jalan dialog itu dan status Otonomi Khusus belum menyentuh persoalan mendasar di Papua, yaitu pemulihan

harga diri orang Papua. Bagi orang-orang Papua, pengalaman bersama Indonesia, terutama selama rezim militer Soeharto berkuasa dirasakan begitu melecehkan harkat dan martabat mereka. Seluruh pelecehan itu, kemudian dikatakan oleh orang-orang Papua sebagai realitas pelanggaran hak asasi manusia, baik yang berupa tindak kekerasan, seperti pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan pemerkosaan.

Pelecehan yang lain adalah Indonesia telah membiarkan orang-orang Papua terperangkap dalam kemiskinan yang kronis tanpa infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan transportasi serta komunikasi yang memadai. Kondisi ini, dalam data yang dilansir oleh harian *Kompas* sekitar 80% orang asli Papua berada dalam gelimang kemiskinan.⁷⁷

Belum adanya jalan keluar bagi masalah kemiskinan dan kelangkaan infrastruktur, serta belum adanya upaya pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia membuat Papua tetap bergejolak meskipun Otonomi Khusus telah diberikan. Pada hal, Otonomi Khusus dirancang sebagai jalan keluar bagi seluruh persoalan yang mengganjal dalam hubungan Jakarta dengan Jayapura.

Belum efektifnya Otsus sebagai jalan keluar tidak terlepas dari realita politik di Papua itu sendiri. Para perancang Otonomi Khusus hanya mengandaikan, bahwa dengan adanya Otonomi Khusus, maka semua pihak akan suka rela mendukungnya. Namun, dalam kenyataannya belum semua pihak mendukung. Salah satu pihak yang belum mendukung sepenuhnya adalah pihak-pihak dari kalangan militer.

Maka dari itu, sampai saat ini, Pengadilan HAM dan KKR yang diwajibkan oleh UU Otonomi Khusus untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat belum terwujud di Papua. Pada hal, dua instansi ini diharapkan menjadi sarana untuk membongkar masalah kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua.

⁷⁵ Theo P.A van den Broek Ofm dan J. Budi Hernawan Ofm, *Memoria Passionis di Papua: Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka, Gambaran 1999*, Keuskupan Jayapura, Jakarta, 2001.

⁷⁶ Yafet Kambai, *op cit.*, hlm. 34—36.

Dengan demikian, membicarakan masalah Papua saat ini yang paling pokok adalah menjelaskan peran dan posisi militer dalam keseluruhan konflik di Papua tersebut. Sikap pemerintah yang selalu membantah dan menutup mata atas terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang dilancarkan oleh anggota ABRI akan merugikan Indonesia sendiri. Selain itu, sikap merasa tak pernah bersalah dari pemerintah Indonesia juga akan menjauhkan orang Papua dari Indonesia.

Gambaran yang terpapar di atas adalah merupakan kenyataan-kenyataan yang pernah dialami oleh orang-orang Papua. Dengan membuka seluruh pengalaman itu, dan memberikan ruang bagi pengalaman orang-orang Papua untuk menjadi bagian darinya akan lebih memudahkan dalam mencari jalan keluar bagi persoalan Papua yang kini kian rumit. Singkatnya, peranan ABRI atau TNI dan Polri di Papua sejak tahun 1960-an sampai tahun 2000 harus dibuka. Sementara itu, seluruh pengalaman pahit orang-orang Papua mesti diakomodasi pula di dalamnya sebagai bagian yang utuh.

Maka dari itu, pembentukan pengadilan HAM dan KKR di Papua sebagaimana diamatkan oleh UU Otonomi Khusus menjadi agenda mendesak di Papua. Tanpa kedua sarana itu, membicarakan masalah Papua seperti jalan di tempat. Jika itu yang terjadi, kekecewan dan perasaan tidak dianggap sebagai bagian dari keindonesiaan akan kian meluas di Papua.*

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George J. 2000. *Cahaya Bintang Kejora*. Jakarta: ELSAM.
- Amiruddin. 2005. "Gerakan Papua Merdeka: Penciptaan Identitas Ke-Papua-an versus Ke-Indonesia-an" dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas*, Vol.III/No.1 Tahun 2005.
- Amiruddin dan Aderito Soarea. 2003. *Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer*. Jakarta: ELSAM.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2005. "Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi." Dalam Dewi Fortuna Anwar (Ed.), *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Obor. Hlm. 255—256.
- Chauvel, Richard dan Ikrar Nusa Bhakti. 2004. *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*, East-West Center, Washington.
- Cholil. 1971. *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*. Puserjarah ABRI—Dephankam.
- Deplu RI. 1998. *Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia*. Jakarta: Deplu RI.
- Djoparai, John R.G. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Elisabeth, Adriana dan Muridan S. Widjojo. 2004. *Pemetaan Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik di Papua*. Jakarta: LIPI.
- Elisabeth, Adriana, dkk. (2005). *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: LIPI.
- Giyai, Benny. 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*, Elsham-Dieyai.
- Kambai, Yafet. 2003. *Gerakan Papua Merdeka di Bawah Bayang-Bayang Mega-Haz*. Jayapura: ELSHAM. Hlm. 29—30.
- Kodam XVII/Tjendrawasih. 1971. *Irian Barat dari Masa ke Masa, Sejarah Militer Kodam XVII/Tjendrawasih*. Puserjarah ABRI.
- Laporan Tim Pengkajian Komnas HAM tentang Permasalahan HAM di Papua (Wamena dan Wasior), Oktober 2003.
- Leith, Denise. 2003. *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. Honolulu: Universiti of Hawaii Press.
- Majalah Sampari*, edisi 02/Februari 2006.
- Mayjen Samsudin. 1994. *Pergolakan di Perbatasan: Operasi Pembebasan Sandera Tanpa Pertumpahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Osborne, Robin. 2001. *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, (terj.). Jakarta: ELSAM.
- Pigai, Decki Natalis BIK. 2001. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Pour, Julius. 1993. *Benny Mordani: Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Perjuangan Panglima Besar Sudirman.
- Raweyai, Yorris T.H. 2002, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*. Jayapura: PDP.
- Sejarah Kodam VIII/Trikora Priode 1982-1990*.
- Sumule, Agus. 2004. *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia.
- Tebay, Neles Keadabi. 1999. "Orang Papua Menuju Kepunahan," makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Gaise, Keuskupan Bandung dan Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, tanggal 12—13 November 1999.
- Van den Broek Ofm, Theo P.A dan J. Budi Hernawan Ofm. 2001. *Memoria Passionis di Papua: Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka, Gambaran 1999*. Jakarta: Keuskupan Jayapura, .
- Van den Broek, Theo. 1999. *Returnees from PNG to Irian jaya: Dealing in Particular with Returnees to Woropko-Mindiptana Area*. Jayapura: SKP.
- Widjojo, Muridhan S. 2005. "Separatisme - Hak Asasi Manusia – Separatisme: Siklus Kekerasan di Papua, Indonesia" dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas*, Vol.III/ No.1 Tahun 2005.

Tabel Nama Pangdam XVII/Tjendrawasih dan Operasi-Operasi yang Dipimpinnya

No	Nama	Lama Tugas	Keterangan
1	Brigjen U Rukman	Mei 1963 —17 April 1964	Operasi Wisnumurti I dan II,
2	Brigjen Inf. Kartidjo	17 April 1964 —	Operasi Wisnumurti III dan IV Operasi Giat dan Tangkas Operasi Sadar Operasi ini dipimpin oleh Danrem 171 Manokwari Letkol Djaka Wargadinata.
3	Brigjen TNI R. Bintoro	23 Maret 1966	Operasi Brathayudha, operasi penghancuran perlawanan dan untuk memenangkan Pepera
4	Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo	25 Juni 1968	Operasi Sadar dan Bratayudha Operasi Wibawa (Persiapan Penyelenggaraan Pepera)
5	Brigjen Acub Zainal	26 Januari 1970 — 1974	Operasi Pamungkas
6	Brigjen Imam Munandar	1977—1978	Operasi di Sepanjang Perbatasan
7	Brigjen C.I. Santosa	1978 —1982	
8	Brigjen RK. Sembiring Meliala	1982—1985	
9	Mayjen H. Simanjuntak	1985—1986	Operasi Gagak I
10	Mayjen Setiana	1986—1987	Operasi Gagak II
11	Mayjen Wismoya Arismunandar	1987—1989	Operasi Kasuari I dan II
12	Mayjen Abinowo	1989—1991	Operasi Rajawali I dan II
13	Mayjen I Ketut Wardhana	1994—1995	
14	Mayjen Joni Lumintang	1995—1996	
15	Mayjen Amir Sembiring	1998—1999**	Pengamanan Daerah Rawan
16	Mayjen Mahidin Simbolon	1999—2002	Operasi Pengendalian Pengibaratan Bendera
17	Mayjen Nurdin Zainal	2002—2004	Operasi Penyisiran di Wamena

* Sejak April 1985 Kodam XVII/Tjendrawasih di gabung dengan Kodam XV/Patimura. Gabungan kedua Kodam ini menjadi Kodam VIII/Trikora dengan pusat komandonya tetap di Jayapura.

** Kodam VIII/Trikora kembali dipecah menjadi dua, yaitu Kodam Trikora di Jayapura dan Kodam Patimura untuk Maluku.